

Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Jl. Ir. Soekarno Hatta No 117 Tulungagung - 66261



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117

Telp. 0355-336516 Fax. 0355-336121

Tulungagung - Jawa Timur 66261

e-mail : pa.tulungagung@gmail.com

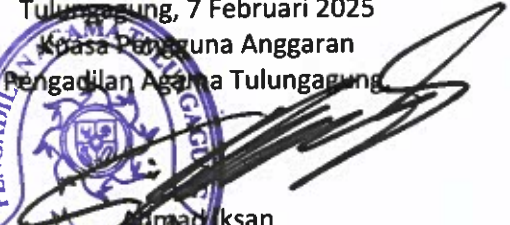
KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Agama Tulungagung adalah salah satu Entitas Akuntansi dibawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tulungagung, 7 Februari 2025
Kepala Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Tulungagung

Muhammad Iksan
NIP. 198610112006041004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	viiviii
NERACA	ix
LAPORAN OPERASIONAL	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	5
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja	13
B.3 Belanja Pegawai	15
B.4 Belanja Barang	15
B.5 Belanja Modal	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	17
C.1. Aset Lancar	17
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	17

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	17
C.1.3. Persediaan	18
C.2. Aset Tetap	18
C.3. Aset Lainnya	19
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	19
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	19
C.4.2. Uang Muka dari KPPN	19
C.5 Ekuitas	20
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	21
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	21
D.2 Beban Pegawai.....	21
D.3 Beban Persediaan	21
D.4 Beban Barang dan Jasa	22
D.5 Beban Pemeliharaan.....	22
D.6 Beban Perjalanan Dinas	23
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	23
D.8 Kegiatan Non Operasional	23
D.9 Pos Luar Biasa	24
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	25
E.1 Ekuitas Awal.....	25
E.2 Surplus/Defisit LO	25
E.3 Transaksi Antar Entitas	25
E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas	25
E.5 Ekuitas Akhir	26
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	27
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	27
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	27
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	27

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 8. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 9. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 10. Rincian Persediaan</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 11. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 12. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 17. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan & Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 18. Rincian Transaksi Antar Entitas</i>	<i>25</i>

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Tulungagung – Jawa Timur 66261

Telp. 0355-336516 Fax. 03551-336121 e-mail: pa.tulungagung@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2024 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tulungagung, 7 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Tulungagung,



Abdullah
NIP. 196510152006041004

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp300.061.000,00 atau mencapai 90% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp333.953.000,00.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2024 adalah sebesar Rp183.250.000,00 atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp183.250.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.840.373,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10.840.373,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.840.373,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp300.061.000,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp189.562.013,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp110.498.987,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp110.498.987,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp6.752.386,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp110.498.987,00, ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp106.411.000,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp10.840.373,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	333.953.000,00	300.061.000,00	90	329.412.000,00	334.928.200,00	102
Jumlah Pendapatan		333.953.000,00	300.061.000,00	90	329.412.000,00	334.928.200,00	102
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.4	183.250.000,00	183.250.000,00	100	159.000.000,00	159.000.000,00	100
Belanja Modal	B.5	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		183.250.000,00	183.250.000,00	100	159.000.000,00	159.000.000,00	100

NERACA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN TAHUN 2023

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2024	2023
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	0,00	0,00
Persediaan	C. 1.3	10.840.373,00	6.752.386,00
Jumlah Aset Lancar		10.840.373,00	6.752.386,00
Aset Tetap	C. 2		
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C. 3		
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		10.840.373,00	6.752.386,00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	10.840.373,00	6.752.386,00
JUMLAH EKUITAS		10.840.373,00	6.752.386,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.840.373,00	6.752.386,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	300.061.000,00	334.928.200,00
JUMLAH PENDAPATAN		300.061.000,00	334.928.200,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	0,00	0,00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	8.312.013,00	9.737.164,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	102.440.000,00	82.440.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	0,00	0,00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	78.810.000,00	75.060.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		189.562.013,00	167.237.164,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		110.498.987,00	167.691.036,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 8		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
POS LUAR BIASA	D. 9	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		110.498.987,00	167.691.036,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	6.752.386,00	7.650.000,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	110.498.987,00	167.691.036,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi		0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 3	(106.411.000,00)	(168.588.650,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 4	4.087.987,00	(897.614,00)
EKUITAS AKHIR	E. 5	10.840.373,00	6.752.386,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar
Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tulungagung

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama
Tulungagung*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG YANG AGUNG".

Misi Pengadilan Agama Tulungagung:

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tulungagung.

Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Tulungagung adalah:

1. Meningkatkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

Sasaran Strategis

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

<i>Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara
---	---

sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis

Akuntansi

Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Tulungagung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Tulungagung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

*Pendapatan-
LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	10%

Lancar	Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas	25

Tanaman Tahunan.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2024 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp333.953.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Adapun revisi yang dilaksanakan hanya pada halaman III terkait Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga tidak terjadi perubahan/pergeseran anggaran yang dialokasikan.

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar
Pendapatan Rp. Rp300.061.000,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp333.953.000,00.
Rp300.061.000, Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung bersumber dari Pendapatan Penerimaan
00. Negara Bukan Pajak Lainnya.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*(dalam Rupiah)*

Kode	Uraian	PER 31 DESEMBER 2024		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	333.953.000,00	300.061.000,00	89,85
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Bruto		333.953.000,00	300.061.000,00	89,85
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		333.953.000,00	300.061.000,00	89,85

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp34.867.200,00 atau 10,41% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya Pendapatan uang meja (Leges), Pendapatan ongkos perkara, serta Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya. Perbandingan realisasi PNBPN 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	300.061.000,00	334.928.200,00	(34.867.200,00)	(10,41)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0,00	11.320.000,00	(11.320.000,00)	(100,00)
425233	Pendapatan Ongkos perkara	92.635.000,00	98.580.000,00	(5.945.000,00)	(6,03)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	207.426.000,00	225.028.200,00	(17.602.200,00)	(7,82)
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		300.061.000,00	334.928.200,00	(34.867.200,00)	(10,41)

B.2 Belanja*Realisasi*

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Tulungagung pada periode 31 Desember 2024 adalah

Belanja

sebesar Rp183.250.000,00 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp183.250.000,00.

Rp183.250.000,

Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

*00.***Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2024**

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	183.250.000,00	183.250.000,00	100,00
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		183.250.000,00	183.250.000,00	100,00
Pengembalian		0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		183.250.000,00	183.250.000,00	100,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp24.250.000,00 atau sebesar 15,25% dibandingkan realisasi periode TA 2023. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
52	Belanja Barang	183.250.000,00	159.000.000,00	24.250.000,00	15,25
53	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Transaksi Kas		183.250.000,00	159.000.000,00	24.250.000,00	15,25

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp0,00*

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak terdapat alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Agama (401382).

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
			-	-
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0

B.4 Belanja Barang

*Belanja
Barang Rp.
Rp183.250.000,
00*

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp183.250.000,00 dan Rp159.000.000,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp24.250.000,00 atau 15,25% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Bahan	240.000,00	240.000,00	0,00	0
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33
Belanja Jasa Konsultan	97.000.000,00	77.000.000,00	20000000,00	0
Belanja Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0
Belanja Jasa Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	78.810.000,00	75.060.000,00	3.750.000,00	5,00
Realisasi Belanja Bruto	183.250.000,00	159.000.000,00	24.250.000,00	15,25
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	183.250.000,00	159.000.000,00	24.250.000,00	15,25

Kenaikan realisasi Belanja Barang disebabkan karena terdapat kenaikan realisasi belanja pada belanja barang persediaan konsumsi, belanja jasa konsultan, dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak terdapat alokasi anggaran Belanja Modal pada Pengadilan Agama Tulugagung (401382). Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0
Realisasi Belanja Netto	0,00	0,00	0,00	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1. Aset Lancar**

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp10.840.373,00 dan Rp6.752.386,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 8. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam Rupiah)*

No	Keterangan	2024	2023
1	Saldo UP	0,00	0,00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
3	Saldo TUP	0,00	0,00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 9. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam Rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Belanja yang masih harus dibayar/utang pihak ketiga yang masih berada di rekening bank bendahara	0,00	0,00
2	Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.3. Persediaan

Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.840.373,00 dan Rp. 6.752.386,00.

10.840.373,00 Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	Mutasi	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	6.752.386,00	4.087.987,00	10.840.373,00
	Jumlah	6.752.386,00	4.087.987,00	10.840.373,00

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap Nilai Aset Tetap Pengadilan Agama Tulungagung per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap .

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rp0,00 Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga dan Uang Muka dari KPPN.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp. 0,00

Rp0,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 11. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga
Jumlah		0,00	

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.5 Ekuitas

Ekuitas Rp. Rp10.840.373,00 Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.840.373,00 dan Rp6.752.386,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada
PNBP Rp0,00 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp300.061.000,00 dan Rp334.928.200,00.
 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 12. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 31 Desember 2024 dan 2023*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	300.061.000,00	334.928.200,00	(10,41)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		300.061.000,00	334.928.200,00	(10,41)
Total		300.061.000,00	334.928.200,00	(10,41)

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengadilan Agama Tulungagung berasal dari Penerimaan Pegawai Bukan Pajak Lainnya berupa penerimaan dari entitas lain. Periode 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp34.867.200,00 (10,41%) dibanding Tahun 2023.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp. 0,00 Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

D.3 Beban Persediaan

Beban Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing
Persediaan sebesar Rp8.312.013,00 dan Rp9.737.164,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 14,64% dibanding Tahun 2023.

Tabel 13. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	8.312.013,00	9.737.164,00	(14,64)
Total		8.312.013,00	9.737.164,00	(14,64)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp102.440.000,00

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp102.440.000,00 dan Rp82.440.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 14. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Bahan	240.000,00	240.000,00	0
2	Beban Jasa Konsultan	97.000.000,00	77.000.000,00	0
3	Beban Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0
4	Beban Jasa Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0
Total		102.440.000,00	82.440.000,00	0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp. 0,00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0
Total		0,00	0,00	0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar
Perjalanan Dinas Rp. 78.810.000,00 dan Rp. 75.060.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi
Rp78.810.000,00 untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian
 Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	78.810.000,00	75.060.000,00	5,00
Total		78.810.000,00	75.060.000,00	5,00

Terdapat kenaikan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Tahun 2024 sebesar 5% dibanding Tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya frekuensi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka Sidang diluar gedung Pengadilan.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah
Penyusutan dan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk
Amortisasi mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan
Rp0,00 (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Aset	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penyusutan	0,00	0,00	0,00
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	0,00
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

D.8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak
Operasional menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk
Rp0,00

0 periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 31 Desember 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.752.386,00 dan Rp. 7.650.000,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus LO Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp110.498.987,00 dan Rp167.691.036,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp. (Rp106.411.000,00) Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp106.411.000,00) dan (Rp168.588.650,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 18. Rincian Transaksi Antar Entitas*(dalam Rupiah)*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	106.411.000,00
Diterima dari Entitas Lain	0,00
Transfer Keluar	0,00
Transfer Masuk	0,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00
JUMLAH	106.411.000,00

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Kenaikan/
Penurunan
Ekuitas
Rp4.087.987,00* Terdapat kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.087.987,00 dan (Rp897.614,00).

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar
Rp10.840.373,00 Rp10.840.373,00 dan Rp6.752.386,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Agama Tulungagung yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat temuan pada pengelolaan Anggaran dan penyampaian Laporan pada Pengadilan Agama Tulungagung.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1) Rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Tulungagung

Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2024 menerima uang persediaan (UP), mengelola, dan menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan rekening giro. Adapun rekening giro yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo
1	BPG 150 Pengadilan Agama Tulungagung QQ 401382	BRI Cabang Tulungagung 6515.44.013821.00.0	0,00

2) Revisi DIPA

DIPA pada Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.04.2.401382/2024 tanggal 24 November 2023 berjumlah sebesar Rp. 159.250.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

PROGRAM	AKUN	DIPA AWAL (Rp)
1053.QBA.003	522131	77.000.000,00
1053.QCA.001	521811	1.500.000,00
	524113	8.750.000,00
1053.QCA.002	521211	240.000,00
	522141	2.000.000,00
	522191	3.200.000,00
	524113	66.560.000,00
JUMLAH PAGU		159.250.000,00

b. Revisi DIPA ke-1 tanggal 19 Februari 2024 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1053.QBA.003	522131	77.000.000,00	77.000.000,00
1053.QCA.001	521811	1.500.000,00	1.500.000,00
	524113	8.750.000,00	8.750.000,00
1053.QCA.002	521211	240.000,00	240.000,00
	522141	2.000.000,00	2.000.000,00
	522191	3.200.000,00	3.200.000,00
	524113	66.560.000,00	66.560.000,00
JUMLAH		159.250.000,00	159.250.000,00

c. Revisi DIPA ke-2 tanggal 22 April 2024 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1053.QBA.003	522131	77.000.000,00	77.000.000,00
1053.QCA.001	521811	1.500.000,00	1.500.000,00
	524113	8.750.000,00	8.750.000,00
1053.QCA.002	521211	240.000,00	240.000,00
	522141	2.000.000,00	2.000.000,00

	522191	3.200.000,00	3.200.000,00
	524113	66.560.000,00	66.560.000,00
JUMLAH		159.250.000,00	159.250.000,00

d. Revisi DIPA ke-3 tanggal 31 Mei 2024 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1053.QBA.003	522131	77.000.000,00	77.000.000,00
1053.QCA.001	521811	1.500.000,00	1.500.000,00
	524113	8.750.000,00	8.750.000,00
1053.QCA.002	521211	240.000,00	240.000,00
	522141	2.000.000,00	2.000.000,00
	522191	3.200.000,00	3.200.000,00
	524113	66.560.000,00	66.560.000,00
JUMLAH		159.250.000,00	159.250.000,00

e. Revisi DIPA ke-4 tanggal 11 Oktober 2024 (Tidak terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1053.QBA.003	522131	77.000.000,00	77.000.000,00
1053.QCA.001	521811	1.500.000,00	1.500.000,00
	524113	8.750.000,00	8.750.000,00
1053.QCA.002	521211	240.000,00	240.000,00
	522141	2.000.000,00	2.000.000,00
	522191	3.200.000,00	3.200.000,00
	524113	66.560.000,00	66.560.000,00
JUMLAH		159.250.000,00	159.250.000,00

f. Revisi DIPA ke-5 tanggal 29 Oktober 2024 (terdapat perubahan pagu)

PROGRAM	AKUN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)
1053.QBA.003	522131	77.000.000,00	97.000.000,00
1053.QCA.001	521811	1.500.000,00	2.000.000,00
	524113	8.750.000,00	12.250.000,00
1053.QCA.002	521211	240.000,00	240.000,00
	522141	2.000.000,00	2.000.000,00
	522191	3.200.000,00	3.200.000,00
	524113	66.560.000,00	66.560.000,00
JUMLAH		159.250.000,00	183.250.000,00

3). Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/PA/SK/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 6994/SEK.PA.W13-A11/KU tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Tulungagung, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 6995/SEK.PA.W13-A11/KU tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Tulungagung, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 6996/SEK.PA.W13-A11/KU tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Tulungagung, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 6998/SEK.PA.W13-A11/KU tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar Pengadilan Agama Tulungagung, telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Alwie, S.H..
Pejabat Pembuat Komitmen	: Riky Yohana, S.E., M.H.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Iksan, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran	: Khusnul Maslikhatin, S.Sos.
Bendahara Penerimaan	: Megatru Raka Pamungkas, S.E.

DATA PENDUKUNG

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.04

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401382

Tgl Data : 03/02/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 03/02/25 8:04 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	333,953,000	300,061,000	(33,892,000)	90	329,412,000	334,928,200	(5,516,200)	102
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	333,953,000	300,061,000	(33,892,000)	90	329,412,000	334,928,200	(5,516,200)	102
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	333,953,000	300,061,000	(33,892,000)	90	329,412,000	334,928,200	(5,516,200)	102
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	183,250,000	183,250,000	0	100	159,000,000	159,000,000	0	100
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	183,250,000	183,250,000	0	100	159,000,000	159,000,000	0	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG 401382

Tgl Data : 03/02/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 03/02/25 8:04 AM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	183,250,000	183,250,000	0	100	159,000,000	159,000,000	0	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

TULUNGAGUNG, 3 Februari 2025
Rekanis JPP Lawab UAKPA
KASIEBAG UIN MAJLIS KEUANGAN
AHMAD IKHSAN S.H., M.H.
NIR 198601192015041004

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 03/02/25 6:24 AM
Tgl Cetak : 03/02/25 8:04 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54
JUMLAH ASET LANCAR	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54
JUMLAH ASET	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54
JUMLAH EKUITAS	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54
JUMLAH EKUITAS	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54

Keterangan :
FINAL

TULUNGAGUNG, 3 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA
WASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN



AHMAD IKHSAN, S.H., M.H.
NIP. 198610152006041004

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 03/02/25 12:52 AM

Tgl Cetak : 03/02/25 8:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,840,373	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	183,250,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	300,061,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	10,400,000
0.0	391111	Ekuitas	0	6,752,386
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	92,635,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	207,426,000
3.0	521211	Beban Bahan	240,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	97,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,200,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	78,810,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,312,013	0
JUMLAH			500,463,386	500,463,386

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 3 Februari 2025

Pengantar dan Jawab UAKR
KASUBAG UMUM DAN KENDANGAN



M. S. B. K. S. A. N. S. H., M.H.
NUP 198610132016041004

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 03/02/25 6:24 AM

Tgl Cetak : 03/02/25 8:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	183,250,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	300,061,000	0
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	92,635,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	207,426,000
3.0	521211	Belanja Bahan	240,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	97,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,200,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	78,810,000	0
JUMLAH			483,311,000	483,311,000

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 3 Februari 2025

Pada tanggal Jawab UAKPA
KASUBBAG UMUM DAN KETIDAK SAMA



ARMED PRASNOH.H., M.H.
198510152006041004

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 03/02/25 12:52 AM

Tgl Cetak : 03/02/25 8:00 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	300,061,000	334,928,200	(34,867,200)	(10.41)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	300,061,000	334,928,200	(34,867,200)	(10.41)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	300,061,000	334,928,200	(34,867,200)	(10.41)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	8,312,013	9,737,164	(1,425,151)	(14.636)
Beban Barang dan Jasa	102,440,000	82,440,000	20,000,000	24.26
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	78,810,000	75,060,000	3,750,000	4.996
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



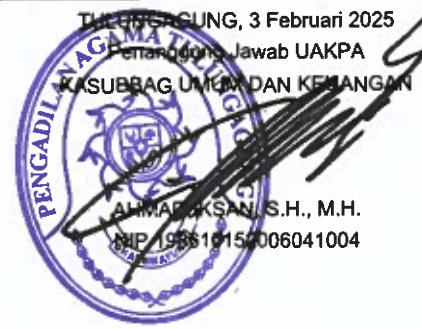
KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 03/02/25 12:52 AM
Tgl Cetak : 03/02/25 8:00 AM
Halaman : 2
lap_to_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	189,562,013	167,237,164	22,324,849	13.349
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	110,498,987	167,691,036	(57,192,049)	(34.106)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	110,498,987	167,691,036	(57,192,049)	(34.106)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	110,498,987	167,691,036	(57,192,049)	(34.106)

Keterangan :

FINAL



Tgl. Pengesahan, 3 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

AHMAD KURNIA S.H., M.H.

NIP. 198810152006041004

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR
SATUAN KERJA : (401382) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 03/02/25 6:24 AM

Tgl Cetak : 03/02/25 8:02 AM

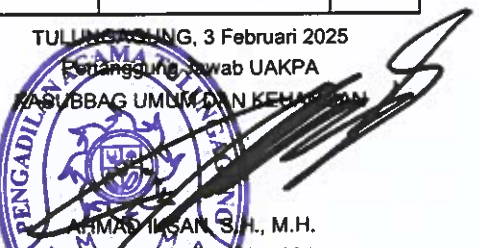
Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,752,386	7,650,000	(897,614)	(11.73)
SURPLUS/DEFISIT-LO	110,498,987	167,691,036	(57,192,049)	(34.11)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(106,411,000)	(168,588,650)	62,177,650	(36.88)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,087,987	(897,614)	4,985,601	(555.43)
EKUITAS AKHIR	10,840,373	6,752,386	4,087,987	60.54

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 3 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SUBBAG UMUM DAN KEHUKUMAN

AHMAD IHSAN S.H., M.H.
NIS 19860102006041004

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 401382 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 03/02/25 6:24 AM
Tanggal : 03/02/25 8:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10,840,373
Jumlah Barang Konsumsi		10,840,373
TOTAL		10,840,373

Keterangan :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi rusak. |
| 2. Persediaan senilai Rp. | 0 dalam kondisi usang. |